

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2014.

C.F.G. Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 2006.

Johannes Ibrahim. *Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan Dan Badan Hukum)*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Johannes Ibrahim, dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.

M.Fuad et.al. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Mokhammad Najih dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia)*. Malang: Setara Press, 2016.

Muhammad Sadi Is. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sacipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Suyud Margono. *Penyelesaian Sengketa Bisnis- Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**C. Jurnal**

Kementerian *Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*. 2014.

**D. Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Keempat. Edisi Ke- 7, 2014.

**E. Lain-lain**

Hasil wawancara dengan YT. *Legal Officer X GROUP*, tertanggal 9 Agustus 2016 Pukul 15.00 WIB. Di kantor holding X GROUP, mengenai kasus konkrit yang terjadi.

